



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

# **KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-5
Tujuan-----	1-3
Ruang Lingkup-----	4-5
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN -----	6-15
Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan -----	8-9
Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer	
Pendapatan antar Pemerintah -----	10
Pengaruh Proses Politik -----	11
Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah -----	12
Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat	
Pengendalian -----	13
Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-----	14
Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian---	15
PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI-----	15-18
Pengguna Laporan Keuangan -----	15
Kebutuhan Informasi -----	17-18
ENTITAS PELAPORAN -----	19-20
PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN-----	21-24
Peranan Pelaporan Keuangan-----	21-22
Tujuan Pelaporan Keuangan -----	23-24
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN-----	25-26
DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN -----	27
ASUMSI DASAR -----	28-31
Kemandirian Entitas -----	29
Kesinambungan Entitas -----	30
Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) -----	31
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN-----	32-37
Relevan -----	33-34
Andal <sup>35</sup>	
Dapat Dibandingkan-----	36
Dapat Dipahami-----	37
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN -----	38-52
Basis Akuntansi-----	39-42
Nilai Historis ( <i>Historical Cost</i> ) -----	43-44



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Realisasi ( <i>Realization</i> )	45-46
Substansi Mengungguli Bentuk Formal ( <i>Substance Over Form</i> )	47
Periodisitas ( <i>Periodicity</i> )	48
Konsistensi ( <i>Consistency</i> )	49
Pengungkapan Lengkap ( <i>Full Disclosure</i> )	50
Penyajian Wajar ( <i>Fair Presentation</i> )	51-52
<b>KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL</b>	<b>53-56</b>
Materialitas	54
Pertimbangan Biaya dan Manfaat	55
Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif	56
<b>UNSUR LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>57-77</b>
Laporan Realisasi Anggaran	57-58
Neraca	59-72
Aset	61-67
Kewajiban	68-71
Ekuitas Dana	72
Laporan Arus Kas	73-74
Catatan atas Laporan Keuangan	75
Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas	76-77
<b>PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>78-89</b>
Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi	81
Keandalan Pengukuran	82-83
Pengakuan Aset	84-85
Pengakuan Kewajiban	86-87
Pengakuan Pendapatan	88
Pengakuan Belanja	89
<b>PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>90-91</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# 1 **KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

## 2 **PENDAHULUAN**

### 3 **Tujuan**

4                   1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari  
5 penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.  
6 Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- 7 (a) penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan  
8 tugasnya;
- 9 (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi  
10 yang belum diatur dalam standar;
- 11 (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan  
12 keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
- 13 (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang  
14 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar  
15 Akuntansi Pemerintahan.

16                   2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal  
17 terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi  
18 Pemerintahan.

19                   3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual  
20 dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif  
21 terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian  
22 diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar  
23 akuntansi di masa depan.

### 24 **Ruang Lingkup**

25                   4. Kerangka konseptual ini membahas:

- 26 (a) tujuan kerangka konseptual;
- 27 (b) lingkungan akuntansi pemerintah;
- 28 (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- 29 (d) entitas pelaporan;
- 30 (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
- 31 (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat  
32 informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala  
33 informasi akuntansi; dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (g) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk  
2 laporan keuangan.

3 5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan  
4 pemerintah pusat dan daerah.

## 5 **LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

6 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh  
7 terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporannya.

8 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu  
9 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan  
10 keuangan adalah sebagai berikut:

11 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

12 (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;

13 (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar  
14 pemerintah;

15 (3) adanya pengaruh proses politik;

16 (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan  
17 pemerintah.

18 (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:

19 (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan  
20 sebagai alat pengendalian;

21 (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan  
22 pendapatan; dan

23 (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan  
24 pengendalian.

## 25 **Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan** 26 **Kekuasaan**

27 8. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  
28 berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan  
29 kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan  
30 pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara  
31 eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi  
32 dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan  
33 kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan.

34 9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan  
35 pemerintahan, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya  
36 kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat  
37 persetujuan, pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi  
2 tersebut. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan  
3 keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

## 4 **Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer** 5 **Pendapatan antar Pemerintah**

6 10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam  
7 sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah  
8 propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas  
9 cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih  
10 sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau  
11 bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem  
12 bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas  
13 pemerintahan.

## 14 **Pengaruh Proses Politik**

15 11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan  
16 kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya  
17 untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan  
18 kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan  
19 sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu  
20 ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah  
21 berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan  
22 yang ada di masyarakat.

## 23 **Hubungan antara Pembayaran Pajak dan** 24 **Pelayanan Pemerintah**

25 12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut  
26 secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian  
27 besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka  
28 memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut  
29 tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah  
30 kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh  
31 pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan  
32 dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- 33 (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya  
34 suka rela.
- 35 (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak  
36 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti  
37 penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai  
38 tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan  
2 pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar  
3 diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah.  
4 Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk  
5 menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah,  
6 seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi  
7 pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.
- 8 (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan  
9 pemerintah adalah relatif sulit.

## 10 **Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik,** 11 **Target Fiskal, dan Alat Pengendalian**

12 13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil  
13 kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan  
14 untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan  
15 untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan  
16 bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran  
17 mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi  
18 upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu  
19 periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak  
20 tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau  
21 kurang dari setahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan  
22 pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan  
23 keuangan, antara lain karena:

- 24 (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- 25 (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan  
26 keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang  
27 diinginkan.
- 28 (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi  
29 hukum.
- 30 (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- 31 (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan  
32 pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah  
33 kepada publik.

## 34 **Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan** 35 **Pendapatan**

36 14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk  
37 aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi.  
2 Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama  
3 sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan  
4 untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian,  
5 fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi  
6 organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan  
7 pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan  
8 komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

## 9 **Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana** 10 **untuk Tujuan Pengendalian**

11 15. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi  
12 dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah  
13 yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-  
14 masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan  
15 keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima.  
16 Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing  
17 kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga  
18 perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan  
19 pemerintah.

## 20 **PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI**

### 21 **Pengguna Laporan Keuangan**

22 16. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan  
23 keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 24 (a) masyarakat;
- 25 (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 26 (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan  
27 pinjaman; dan
- 28 (d) pemerintah.

### 29 **Kebutuhan Informasi**

30 17. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan  
31 umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok  
32 pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang  
33 untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok  
34 pengguna. Namun demikian, berhubung pajak merupakan sumber utama





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi  
2 kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

3 18. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang  
4 tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan  
5 informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan  
6 perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya,  
7 pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk  
8 kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka  
9 konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih  
10 lanjut.

## 11 ENTITAS PELAPORAN

12 19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari  
13 satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan  
14 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban  
15 berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

- 16 (a) Pemerintah pusat;  
17 (b) Pemerintah daerah;  
18 (c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau  
19 organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan  
20 organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

21 20. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan  
22 syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan  
23 terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk  
24 pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan  
25 lainnya.

## 26 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN 27 KEUANGAN

### 28 Peranan Pelaporan Keuangan

29 21. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang  
30 relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh  
31 suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan  
32 terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja,  
33 transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai  
34 kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas  
35 pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan  
36 perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1                    22. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk  
2 melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam  
3 pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode  
4 pelaporan untuk kepentingan:
- 5        (a) Akuntabilitas
- 6                    Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta  
7 pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan  
8 dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 9        (b) Manajemen
- 10                    Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  
11 suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga  
12 memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas  
13 seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk  
14 kepentingan masyarakat.
- 15        (c) Transparansi
- 16                    Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada  
17 masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak  
18 untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas  
19 pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang  
20 dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-  
21 undangan.
- 22        (d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
- 23                    Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan  
24 pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh  
25 pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang  
26 diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

## 27        **Tujuan Pelaporan Keuangan**

- 28                    23. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan  
29 informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas  
30 dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik  
31 dengan:
- 32        (a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode  
33 berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 34        (b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber  
35 daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan  
36 peraturan perundang-undangan.
- 37        (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang  
38 digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah  
39 dicapai.
- 40        (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan  
41 mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas  
2 pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik  
3 jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari  
4 pungutan pajak dan pinjaman.
- 5 (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas  
6 pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai  
7 akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 8 24. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan  
9 menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana  
10 cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu  
11 entitas pelaporan.

## 12 **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

13 25. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- 14 (a) Laporan Realisasi Anggaran;  
15 (b) Neraca;  
16 (c) Laporan Arus Kas;  
17 (d) Catatan atas Laporan Keuangan.

18 26. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf  
19 25, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan  
20 dan Laporan Perubahan Ekuitas.

## 21 **DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

22 27. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan  
23 peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara  
24 lain:

- 25 (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang  
26 mengatur keuangan negara;  
27 (b) Undang-undang di bidang keuangan negara;  
28 (c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
29 (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah  
30 daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;  
31 (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan  
32 keuangan pusat dan daerah;  
33 (f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran  
34 Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan  
35 (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang  
36 keuangan pusat dan daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **ASUMSI DASAR**

2 28. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan  
3 pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa  
4 perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- 5 (a) Asumsi kemandirian entitas;
- 6 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- 7 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

## 8 **Kemandirian Entitas**

9 29. Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun  
10 akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang  
11 mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan  
12 sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam  
13 pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah  
14 adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan  
15 melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab  
16 atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan  
17 yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset  
18 dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan  
19 entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

## 20 **Kesinambungan Entitas**

21 30. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas  
22 pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah  
23 diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan  
24 dalam jangka pendek.

## 25 **Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary*** 26 ***Measurement*)**

27 31. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap  
28 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini  
29 diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam  
30 akuntansi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1      **KARAKTERISTIK      KUALITATIF      LAPORAN** 2      **KEUANGAN**

3                    32. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran  
4 normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat  
5 memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat  
6 normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat  
7 memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- 8      (a) Relevan;
- 9      (b) Andal;
- 10     (c) Dapat dibandingkan; dan
- 11     (d) Dapat dipahami.

### 12     **Relevan**

13                    33. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi  
14 yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan  
15 membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan  
16 memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi  
17 mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang  
18 relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

19                    34. Informasi yang relevan :

- 20     (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)  
21                    Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau  
22                    mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 23     (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)  
24                    Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang  
25                    akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 26     (c) Tepat waktu  
27                    Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan  
28                    berguna dalam pengambilan keputusan.
- 29     (d) Lengkap  
30                    Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap  
31                    mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat  
32                    mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang  
33                    melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam  
34                    laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam  
35                    penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **Andal**

2 35. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian  
3 yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara  
4 jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat  
5 atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi  
6 tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal  
7 memenuhi karakteristik:

### 8 (a) Penyajian Jujur

9 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa  
10 lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat  
11 diharapkan untuk disajikan.

### 12 (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

13 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan  
14 apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,  
15 hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

### 16 (c) Netralitas

17 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada  
18 kebutuhan pihak tertentu.

## 19 **Dapat Dibandingkan**

20 36. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih  
21 berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode  
22 sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.  
23 Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan  
24 secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan  
25 akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal  
26 dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan  
27 akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan  
28 kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang  
29 sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode  
30 terjadinya perubahan.

## 31 **Dapat Dipahami**

32 37. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat  
33 dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang  
34 disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna  
35 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan  
36 lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna  
37 untuk mempelajari informasi yang dimaksud.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# 1 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN 2 KEUANGAN

3 38. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan  
4 sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam  
5 penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan  
6 keuangan dalam melakukannya, serta oleh pengguna laporan  
7 keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini  
8 adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan  
9 keuangan pemerintah:

- 10 (a) Basis akuntansi;
- 11 (b) Prinsip nilai historis;
- 12 (c) Prinsip realisasi;
- 13 (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- 14 (e) Prinsip periodisitas;
- 15 (f) Prinsip konsistensi;
- 16 (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- 17 (h) Prinsip penyajian wajar.

## 18 **Basis Akuntansi**

19 39. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan  
20 pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan  
21 pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk  
22 pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

23 40. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa  
24 pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum  
25 Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas  
26 dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas  
27 pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa  
28 pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode  
29 tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan  
30 dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk  
31 barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

32 41. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan  
33 ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat  
34 kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah,  
35 tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

36 42. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan  
37 sebagaimana dimaksud pada paragraf 26 menyelenggarakan akuntansi dan  
38 penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun  
2 dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian,  
3 penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

#### 4 **Nilai Historis (*Historical Cost*)**

5 43. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang  
6 dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk  
7 memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar  
8 jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk  
9 memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan  
10 pemerintah.

11 44. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang  
12 lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai  
13 historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

#### 14 **Realisasi (*Realization*)**

15 45. Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah  
16 diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan  
17 digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

18 46. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against*  
19 *revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan  
20 sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

#### 21 **Substansi Mengungguli Bentuk Formal** 22 **(*Substance Over Form*)**

23 47. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar  
24 transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau  
25 peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi  
26 dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila  
27 substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek  
28 formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam  
29 Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 30 **Periodisitas (*Periodicity*)**

31 48. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan  
32 perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas  
33 dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.  
34 Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan,  
35 triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **Konsistensi (*Consistency*)**

2 49. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian  
3 yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip  
4 konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan  
5 dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi  
6 yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru  
7 diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode  
8 lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam  
9 Catatan atas Laporan Keuangan.

## 10 **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

11 50. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi  
12 yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna  
13 laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*)  
14 laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

## 15 **Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**

16 51. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan  
17 Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan  
18 Keuangan.

19 52. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan  
20 diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.  
21 Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta  
22 tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan  
23 laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian  
24 pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset  
25 atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak  
26 dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan  
27 sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan  
28 tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau  
29 rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi,  
30 sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

## 31 **KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN** 32 **ANDAL**

33 53. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah  
34 setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal  
35 dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan  
2 kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi  
3 dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:

4 (a) Materialitas;

5 (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;

6 (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

## 7 **Materialitas**

8 54. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan  
9 keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi  
10 kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk  
11 mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat  
12 mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar  
13 laporan keuangan.

## 14 **Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

15 55. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya  
16 penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak  
17 semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari  
18 biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat  
19 merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus  
20 dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin  
21 juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan  
22 informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin  
23 akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

## 24 **Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

25 56. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk  
26 mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif  
27 yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan  
28 relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara  
29 relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua  
30 karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 UNSUR LAPORAN KEUANGAN

### 2 Laporan Realisasi Anggaran

3 57. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber,  
4 alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah  
5 pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan  
6 realisasinya dalam satu periode pelaporan.

7 58. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi  
8 Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-  
9 masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- 10 (a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum  
11 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya  
12 yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran  
13 yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu  
14 dibayar kembali oleh pemerintah.
- 15 (b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai  
16 penambah nilai kekayaan bersih.
- 17 (c) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum  
18 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana  
19 lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan  
20 diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 21 (d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui  
22 sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 23 (e) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas  
24 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana  
25 perimbangan dan dana bagi hasil.
- 26 (f) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar  
27 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada  
28 tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran  
29 berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama  
30 dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus  
31 anggaran.
- 32 (g) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan  
33 hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk  
34 pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada  
35 entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

### 36 Neraca

37 59. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas  
38 pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   60. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban,  
2 dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- 3           (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  
4 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana  
5 manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat  
6 diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur  
7 dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang  
8 diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-  
9 sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 10           (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang  
11 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi  
12 pemerintah.
- 13           (c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan  
14 selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

## 15           **Aset**

16                   61. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset  
17 adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung  
18 maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran  
19 pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

20                   62. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar.  
21 Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk  
22 dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12  
23 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan  
24 dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

25                   63. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka  
26 pendek, piutang, dan persediaan.

27                   64. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang,  
28 dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung  
29 untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset  
30 nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana  
31 cadangan, dan aset lainnya.

32                   65. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan  
33 dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial  
34 dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka  
35 panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi  
36 nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan  
37 modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.  
38 Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi  
39 permanen lainnya.

40                   66. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan  
41 bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi  
42 dalam pengerjaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1                   67. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.  
2 Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama  
3 (kemitraan).

#### 4                   **Kewajiban**

5                   68. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah  
6 mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya  
7 mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan  
8 datang.

9                   69. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan  
10 tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks  
11 pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber  
12 pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas  
13 pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga  
14 terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau  
15 dengan pemberi jasa lainnya.

16                   70. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai  
17 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-  
18 undangan.

19                   71. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek  
20 dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan  
21 kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas  
22 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok  
23 kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan  
24 sejak tanggal pelaporan.

#### 25                   **Ekuitas Dana**

26                   72. Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 27                   (a) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan  
28 kewajiban jangka pendek.
- 29                   (b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang  
30 tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi  
31 dengan kewajiban jangka panjang.
- 32                   (c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang  
33 dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai  
34 peraturan perundang-undangan.

#### 35                   **Laporan Arus Kas**

36                   73. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan  
37 dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan  
38 transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode  
2 tertentu.

3 74. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari  
4 penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai  
5 berikut:

6 (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara  
7 Umum Negara/Daerah.

8 (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara  
9 Umum Negara/Daerah.

## 10 **Catatan atas Laporan Keuangan**

11 75. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif  
12 atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,  
13 Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga  
14 mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh  
15 entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk  
16 diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-  
17 ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan  
18 secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal  
19 sebagai berikut:

20 (a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi  
21 makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut  
22 kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

23 (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun  
24 pelaporan;

25 (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan  
26 dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas  
27 transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

28 (d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi  
29 Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*)  
30 laporan keuangan;

31 (e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang  
32 timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan  
33 dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan

34 (f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian  
35 yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*)  
36 laporan keuangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1      **Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan** 2      **Perubahan Ekuitas**

3                    76. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi  
4 pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam  
5 laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan  
6 operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan  
7 surplus atau defisit.

8                    77. Laporan lainnya yang diperkenankan adalah Laporan  
9 Perubahan Ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan kenaikan atau  
10 penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 11      **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

12                    78. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan  
13 terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan  
14 akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,  
15 kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan,  
16 sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang  
17 bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang  
18 terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau  
19 peristiwa terkait.

20                    79. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau  
21 peristiwa untuk diakui yaitu:

- 22                    (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan  
23 kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk  
24 ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- 25                    (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat  
26 diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

27                    80. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa  
28 memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

## 29      **Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa** 30      **Depan Terjadi**

31                    81. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan  
32 besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian  
33 derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan  
34 dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke  
35 entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian  
36 lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti  
2 yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

### 3 **Keandalan Pengukuran**

4 82. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang  
5 akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya.  
6 Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak.  
7 Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak  
8 mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan  
9 pada Catatan atas Laporan Keuangan.

10 83. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi  
11 apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi  
12 peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

### 13 **Pengakuan Aset**

14 84. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan  
15 diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur  
16 dengan andal.

17 85. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain  
18 bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi,  
19 pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain,  
20 serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan  
21 setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak  
22 pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh  
23 pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan  
24 pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu  
25 sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum  
26 Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat  
27 ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode  
28 akuntansi berjalan.

### 29 **Pengakuan Kewajiban**

30 86. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran  
31 sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk  
32 menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban  
33 tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

34 87. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada  
35 saat kewajiban timbul.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1 **Pengakuan Pendapatan**

2 88. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di  
3 Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.  
4 Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas  
5 pendapatan tersebut.

## 6 **Pengakuan Belanja**

7 89. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya  
8 pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas  
9 pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran  
10 pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran  
11 tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja  
12 menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat  
13 diperoleh manfaat.

## 14 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

15 90. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk  
16 mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.  
17 Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan  
18 historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar  
19 nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.  
20 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

21 91. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata  
22 uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi  
23 terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT NEGARA RI**  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**